

Evaluasi Manajemen Pajak pada Perusahaan Perdagangan Besar Barang Logam untuk Bahan Konstruksi (Studi Kasus di Perusahaan PMA PT. ABC)

Yang Guoquan, Ibu Siti Nuryanah

Universitas Indonesia, Indonesia

Email: yangjoan689@gmail.com

Kata Kunci	Abstrak
Manajemen Pajak; Perusahaan Perdagangan Logam; Bahan Konstruksi; Perusahaan Penanaman Modal Asing	Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia dihadapkan pada tantangan signifikan yang berasal dari kompleksitas dan dinamika regulasi perpajakan. Kondisi ini menuntut adanya sistem manajemen pajak yang tidak hanya patuh, tetapi juga efisien untuk menjaga kesehatan finansial perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan praktik terbaik manajemen pajak (best practice tax management) pada PT ABC, sebuah perusahaan PMA yang bergerak di sektor perdagangan besar barang logam untuk bahan konstruksi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kasus, penelitian ini mengkaji secara mendalam aspek perencanaan, implementasi, dan pengendalian pajak di perusahaan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dengan manajer keuangan dan analisis dokumen internal perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT ABC telah memiliki fondasi manajemen pajak yang solid, mencakup penggunaan sistem SAP, Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi, dan pelaksanaan audit rutin. Namun, identifikasi lebih lanjut menemukan adanya tantangan operasional, seperti tekanan pada arus kas akibat mekanisme restitusi pajak, tingginya biaya kepatuhan, dan sistem teknologi yang belum terintegrasi sepenuhnya dengan platform digital otoritas pajak. Studi ini merekomendasikan lima langkah strategis untuk optimisasi, yaitu peningkatan integrasi teknologi, eksplorasi insentif fiskal, formalisasi kerja sama dengan konsultan eksternal, penyusunan kebijakan pajak internal, serta implementasi sistem monitoring arus kas yang lebih canggih.
Keywords: Tax Management; Metal Trading Company; Construction Materials; Foreign Investment Company.	Abstract <i>Foreign Investment Companies (PMA) in Indonesia face significant challenges arising from the complexity and dynamics of tax regulations. This situation requires a tax management system that is not only compliant but also efficient in order to maintain the financial health of the company. This study aims to evaluate the implementation of best practice tax management at PT ABC, a PMA company operating in the wholesale trade of metal goods for construction materials. Using a qualitative approach through case study methodology, this research examines in depth the aspects of tax planning, implementation, and control within the company. Data collection was conducted through semi-structured interviews with financial managers and analysis of internal company documents. The results of the study indicate that PT ABC has a solid tax management foundation, including the use of the SAP system, documented Standard Operating Procedures (SOPs), and the implementation of routine audits. However, further identification revealed operational challenges, such as cash flow pressure due to tax refund mechanisms, high compliance costs, and a technology system that is not yet fully integrated with the tax authority's digital platform. This study recommends five strategic steps for optimization: enhancing technology integration, exploring fiscal incentives, formalizing collaboration with external consultants, developing internal tax policies, and implementing a more advanced cash flow monitoring system.</i>



PENDAHULUAN

Berdasarkan data Kementerian Investasi Indonesia, pada triwulan I tahun 2023, realisasi investasi di Indonesia mencapai Rp328,9 triliun (sekitar US\$22,126 miliar), tumbuh 16,5% secara tahunan. Di antara total investasi tersebut, investasi asing mencapai Rp177,0 triliun (sekitar US\$11,905 miliar), dengan pertumbuhan sebesar 20,2% secara tahunan, atau setara dengan 53,8% dari total realisasi investasi (Kementerian Investasi, 2023). Angka ini menunjukkan pentingnya peran investasi asing dalam perekonomian Indonesia, khususnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan infrastruktur.

Realisasi penerimaan pajak dari perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) juga menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan negara (Adi & Syahlina, 2020; Hasanuddin & Roy, 2022; Ratnasari & Aji, 2023; Rumalutur et al., 2022; Sari, 2020). Pada tahun 2023, total penerimaan pajak di Indonesia mencapai Rp2.155,4 triliun, melampaui target dengan pertumbuhan sebesar 5,9% dibandingkan tahun sebelumnya (Databoks, 2023). Dari jumlah tersebut, penerimaan pajak dari sektor PMA memainkan peranan penting. Hal ini menegaskan bahwa manajemen pajak yang efisien dan efektif bagi perusahaan PMA memiliki dampak signifikan terhadap penerimaan negara (Handoko & Prihadiati, 2023; Juliana et al., 2023; Zhafari, 2023).

Sektor PMA menghadapi tantangan besar terkait peraturan pajak di Indonesia, yang sering berubah dan kompleks. Perubahan kebijakan yang terus-menerus ini bertujuan untuk menyesuaikan distribusi pendapatan dan meningkatkan stabilitas fiskal, tetapi juga menciptakan ketidakpastian bagi perusahaan asing (World Bank Group, 2020). Klausul pajak yang tidak jelas dan kurangnya panduan implementasi mengakibatkan kesulitan dalam kepatuhan pajak dan meningkatkan risiko sengketa pajak antara perusahaan dan otoritas (IMF, 2021). Sebagai contoh, beberapa kebijakan insentif pajak tidak menjelaskan secara rinci syarat penerapan, metode perhitungan, dan masa berlakunya, sehingga sulit bagi perusahaan untuk memanfaatkannya secara optimal.

Penelitian terdahulu oleh Pohan (2015) menyoroti bahwa perusahaan PMA di Indonesia seringkali menghadapi kesulitan dalam mengintegrasikan sistem perpajakan lokal dengan praktik global, terutama dalam hal pelaporan dan kepatuhan. Studi Suandy (2016) juga mengidentifikasi bahwa kompleksitas regulasi pajak Indonesia menyebabkan tingginya biaya kepatuhan (*compliance cost*) bagi perusahaan asing. Sementara itu, Rahayu, Siti (2017) menekankan pentingnya perencanaan pajak strategis untuk memitigasi risiko sengketa pajak dan mengoptimalkan arus kas.

Novelty penelitian ini terletak pada fokus spesifik terhadap perusahaan PMA di sektor perdagangan besar logam untuk bahan konstruksi, yang belum banyak diteliti sebelumnya. Berbeda dengan studi terdahulu yang umumnya membahas manajemen pajak secara luas, penelitian ini mengkaji tantangan unik yang dihadapi PT ABC, seperti ketidakmampuan mengkreditkan PPN keluaran dan tekanan arus kas akibat mekanisme restitusi pajak. Selain itu, penelitian ini memberikan rekomendasi strategis berbasis teknologi dan integrasi sistem, yang belum diusulkan secara mendalam dalam literatur sebelumnya.

PT ABC, sebuah perusahaan PMA yang bergerak di bidang perdagangan besar barang logam (baja) untuk bahan konstruksi, menghadapi masalah terkait kompleksitas perpajakan di Indonesia. Dalam transaksi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT ABC membeli baja dari pabrik dalam negeri dan menerima faktur pajak masukan dengan status "Kepada Pihak yang Bukan Pemungut PPN" (010). Dalam hal ini, total pembayaran melibatkan DPP + PPN 11% + PPh Pasal 22 sebesar 0,3% (Kementerian Keuangan, 2023). Namun, karena tidak dapat mengkreditkan PPN keluaran, PT ABC mengalami kelebihan pembayaran pajak, yang berdampak pada arus kas perusahaan dan membutuhkan proses pengembalian pajak yang rumit.

Margin laba kotor yang rendah, yakni sebesar 5,80%, dan margin laba bersih sebesar 3,03% pada Januari-Juni 2024, semakin menekan kondisi keuangan PT ABC. Kelebihan pembayaran pajak, ketidakmampuan untuk mengkreditkan PPN keluaran, serta tingginya biaya kepatuhan (compliance cost) membuat perusahaan harus mengalokasikan sumber daya yang signifikan untuk konsultasi perpajakan dan pelatihan guna mengurangi risiko ketidakpatuhan. Hal ini menandakan bahwa manajemen pajak di PT ABC belum berjalan secara efektif dan perlu ditingkatkan untuk mendukung kesehatan keuangan perusahaan.

Penelitian ini berfokus pada aspek manajemen pajak sebagai isu utama, yang lebih dominan daripada faktor margin laba yang rendah. Kompleksitas dan frekuensi perubahan peraturan pajak di Indonesia tidak hanya berdampak pada beban administrasi, tetapi juga menghambat perusahaan dalam membuat perencanaan pajak yang strategis. Ketidakjelasan dalam klausul pajak dan perubahan regulasi yang tidak menentu menciptakan risiko bagi perusahaan PMA seperti PT ABC dalam memenuhi kewajiban pajaknya secara efisien.

Efektivitas pengelolaan pajak menjadi faktor kunci dalam memastikan perusahaan tidak hanya patuh terhadap peraturan yang berlaku, tetapi juga mampu mengelola arus kas dengan lebih baik, meminimalkan risiko sengketa pajak, dan meningkatkan daya saingnya di pasar. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengeksplorasi strategi manajemen pajak yang dapat diterapkan oleh PT ABC guna meningkatkan efisiensi kepatuhan pajak serta mengoptimalkan arus kas.

Motivasi utama dalam memilih topik ini adalah karena pentingnya perpajakan sebagai komponen strategis dalam manajemen perusahaan PMA, terutama di Indonesia yang memiliki peraturan perpajakan yang rumit dan sering berubah. Dalam konteks PT ABC, manajemen pajak yang efektif sangat krusial karena setiap perubahan dalam kebijakan pajak dapat berdampak langsung pada profitabilitas dan kepatuhan hukum perusahaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi konkret untuk membantu PT ABC dan perusahaan PMA lainnya dalam mengelola pajak secara lebih efisien.

Selain itu, penelitian ini memiliki urgensi karena masih sedikitnya studi akademis yang fokus pada manajemen pajak perusahaan PMA di Indonesia. Sebagai perusahaan yang bergerak di sektor perdagangan besar logam, PT ABC menghadapi tantangan unik yang tidak dialami oleh perusahaan lokal. Perbedaan regulasi perpajakan antara negara asal perusahaan dan Indonesia serta perbedaan budaya bisnis membuat manajemen pajak menjadi lebih kompleks bagi perusahaan ini dibandingkan perusahaan lokal. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademis yang signifikan, tetapi juga memberikan

rekomenadasi praktis bagi PT ABC untuk mengoptimalkan pengelolaan pajak dan memitigasi risiko yang terkait.

Dalam situasi ekonomi global yang dinamis, manajemen pajak yang efektif dapat menjadi faktor penentu keberhasilan perusahaan PMA di Indonesia. Penelitian ini berupaya untuk memberikan solusi yang praktis dan strategis bagi PT ABC dalam menghadapi kompleksitas perpajakan, dengan tujuan agar perusahaan dapat lebih kompetitif dan berkontribusi secara positif terhadap perekonomian Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi masalah-masalah pajak spesifik yang dihadapi oleh PT ABC, seperti kesulitan dalam pemenuhan kewajiban pajak, pengelolaan kredit pajak, dan pelaporan pajak yang akurat. Dengan mengetahui masalah ini, PT ABC dapat merumuskan solusi yang lebih tepat dan efektif.

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan, Secara akademis, studi ini mengisi celah literatur tentang manajemen pajak perusahaan PMA di sektor logam konstruksi dan memperkaya kajian penerapan *Best Practice Tax Management* di Indonesia. Secara praktis, temuan penelitian menawarkan solusi konkret bagi PT ABC untuk meningkatkan efisiensi pajak, khususnya dalam mengatasi masalah restitusi PPN dan kepatuhan, yang juga dapat diaplikasikan perusahaan PMA sejenis. Rekomendasi berbasis teknologi dan insentif fiskal yang dihasilkan dapat menjadi panduan praktis bagi pelaku bisnis.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus sebagai metode utamanya. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi perusahaan, laporan keuangan, laporan pajak, serta literatur yang relevan dengan topik penelitian. Metode ini melibatkan analisis mendalam terhadap data yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk dokumen perpajakan, laporan keuangan, dan wawancara dengan pihak terkait di PT ABC dalam hal ini adalah manager PT. ABC. Dengan pendekatan ini, penulis dapat mengkaji bagaimana kebijakan pajak dan kepatuhan perpajakan mempengaruhi operasi dan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Dalam menganalisis data, peneliti menerapkan analisis konten untuk mengidentifikasi pola dan tema penting, triangulasi data untuk memastikan validitas temuan dengan membandingkan berbagai sumber data, serta analisis SWOT untuk mengevaluasi aspek internal dan eksternal sistem manajemen pajak perusahaan. Kombinasi metode dan teknik analisis ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan objektif tentang efektivitas manajemen pajak di PT ABC serta menghasilkan rekomendasi yang relevan dengan konteks operasional perusahaan PMA di Indonesia.

Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif tentang tantangan dan solusi dalam manajemen pajak, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam praktik perpajakan perusahaan yang relevan dengan kondisi dan karakteristik spesifik PT ABC. Referensi yang relevan untuk pendekatan kualitatif dan studi kasus dalam konteks penelitian ini meliputi Sandford et al. (1989) yang menjelaskan tentang biaya kepatuhan perpajakan dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi biaya operasional perusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen pajak di PT ABC, sebuah perusahaan PMA di sektor perdagangan besar barang logam untuk bahan konstruksi, menggunakan kerangka Best Practice Tax Management (BPTM). Evaluasi didasarkan pada data kualitatif dari wawancara mendalam dengan manajer keuangan PT ABC dan konsultan pajak eksternal, serta analisis dokumen internal dan peraturan terkait.

Analisis Komprehensif Implementasi *Best Practice Tax Management* (BPTM) pada PT ABC

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara mendalam dengan tiga narasumber kunci, yaitu Manajer Keuangan PT ABC dan dua konsultan pajak eksternal senior, diperoleh gambaran komprehensif mengenai praktik manajemen pajak perusahaan. Analisis ini menggunakan kerangka Best Practice Tax Management (BPTM) untuk mengevaluasi tiga dimensi utama: perencanaan pajak (*tax planning*), pelaksanaan pajak (*tax implementation*), dan pengendalian pajak (*tax control*).

Dimensi Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Hasil analisis menunjukkan bahwa PT ABC telah mengembangkan fondasi perencanaan pajak yang relatif kuat melalui implementasi *Standard Operating Procedure* (SOP) manajemen pajak yang terstandarisasi. Perusahaan menerapkan pendekatan sistematis dalam mengelola berbagai jenis kewajiban perpajakan, dimulai dari pembentukan tim khusus yang terdiri dari divisi kepatuhan, divisi pelaporan, dan divisi penyelesaian sengketa yang bekerja di bawah koordinasi langsung *Chief Financial Officer* (CFO).

Dalam konteks perencanaan strategis, PT ABC telah memanfaatkan beberapa instrumen legal untuk optimisasi pajak, khususnya melalui pengajuan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 dan fasilitas restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pemanfaatan SKB PPh Pasal 22 menunjukkan pemahaman perusahaan terhadap mekanisme perpajakan yang dapat memberikan manfaat arus kas dengan mengurangi pemotongan pajak di muka. Sementara itu, pengajuan restitusi PPN melalui sistem web-efaktur mencerminkan upaya perusahaan untuk mengoptimalkan posisi kelebihan bayar yang terjadi akibat karakteristik bisnis perdagangan besar yang menghasilkan PPN masukan lebih tinggi dibandingkan PPN keluaran.

Namun demikian, temuan penelitian mengindikasikan bahwa perusahaan belum sepenuhnya mengeksplorasi potensi insentif perpajakan yang tersedia. Khususnya, PT ABC belum memanfaatkan fasilitas *tax holiday* yang berpotensi memberikan manfaat signifikan bagi perusahaan penanaman modal asing (PMA). Kondisi ini menunjukkan adanya ruang untuk optimisasi lebih lanjut dalam strategi perencanaan pajak perusahaan.

Dimensi Pelaksanaan Pajak (*Tax Implementation*)

Analisis terhadap pelaksanaan pajak menunjukkan bahwa PT ABC telah mengimplementasikan sistem yang relatif canggih melalui penggunaan SAP (*Systems, Applications, and Products in Data Processing*) sebagai platform utama untuk mengelola seluruh aspek perpajakan. Sistem ini memungkinkan integrasi antara fungsi akuntansi dan perpajakan, mulai dari pencatatan transaksi hingga penghitungan kewajiban pajak secara otomatis.

Dalam pengelolaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, perusahaan menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi dengan tidak pernah mengalami keterlambatan pembayaran atau pengenaan sanksi administrasi. Sistem SAP yang dilengkapi dengan mesin hitung PPh 21 otomatis memungkinkan penghitungan yang akurat berdasarkan parameter gaji, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dan tarif progresif yang berlaku. Proses pembayaran melalui sistem e-Billing juga menunjukkan adopsi teknologi digital yang mendukung efisiensi operasional.

Untuk PPh Pasal 22, perusahaan menghadapi tantangan yang lebih kompleks karena berperan ganda sebagai pemungut dan objek pemotongan dalam transaksi bisnis. Ketika bertindak sebagai pembeli, PT ABC dikenai PPh Pasal 22 sebesar 0,3% atas pembelian bahan logam, sementara ketika menjual kepada institusi pemerintah atau BUMN, perusahaan memungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5%. Kompleksitas ini memerlukan pemahaman mendalam terhadap regulasi dan sistem pencatatan yang akurat.

Pengelolaan PPN menunjukkan karakteristik unik dimana PT ABC secara konsisten mengalami posisi kelebihan bayar (overpayment) akibat struktur bisnis yang menghasilkan PPN masukan lebih tinggi dari PPN keluaran. Kondisi ini menciptakan tantangan arus kas karena proses restitusi yang relatif lambat, meskipun perusahaan telah berhasil memperoleh Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) sebagai konfirmasi hak restitusi.

Dimensi Pengendalian Pajak (*Tax Control*)

Sistem pengendalian pajak PT ABC menunjukkan implementasi tata kelola yang memadai melalui keterlibatan aktif dewan direksi dalam peninjauan laporan kepatuhan pajak. Pendekatan ini mencerminkan prinsip *tone at the top* dalam manajemen risiko perpajakan, dimana komitmen dari level tertinggi organisasi menjadi fondasi bagi implementasi praktik perpajakan yang sound.

Perusahaan telah mengembangkan mekanisme pemantauan perubahan regulasi melalui program pelatihan berkala bagi tim pajak. Langkah ini penting mengingat dinamika perubahan peraturan perpajakan Indonesia yang relatif cepat dan seringkali memerlukan penyesuaian sistem serta prosedur internal. Namun demikian, temuan menunjukkan bahwa perusahaan menghadapi tantangan dalam mengikuti kompleksitas regulasi yang multitafsir dan memerlukan interpretasi profesional.

Aspek yang memerlukan perhatian adalah belum optimalnya pemanfaatan konsultan pajak eksternal, meskipun perusahaan sedang dalam tahap negosiasi untuk menjalin kerja sama. Keterlibatan konsultan eksternal dapat memberikan perspektif objektif dan keahlian spesialisasi yang diperlukan untuk mengelola isu-isu perpajakan kompleks, terutama dalam konteks transaksi lintas negara dan interpretasi perjanjian penghindaran pajak berganda.

Evaluasi Kepatuhan dan Manajemen Risiko

Analisis menunjukkan bahwa PT ABC memiliki track record kepatuhan yang baik dengan tidak pernah mengalami sengketa pajak dalam tiga tahun terakhir. Capaian ini mencerminkan efektivitas sistem pengendalian internal dan pendekatan konservatif dalam interpretasi regulasi perpajakan. Perusahaan menerapkan prinsip kehati-hatian dengan tidak memanfaatkan celah hukum (*loopholes*) untuk tujuan penghindaran pajak yang agresif.

Namun demikian, ditemukan adanya keterlambatan dalam pelaporan pajak yang mengindikasikan perlunya penguatan sistem reminder dan monitoring deadline. Meskipun tidak menimbulkan sengketa, keterlambatan ini berpotensi menimbulkan sanksi administrasi dan dapat mempengaruhi reputasi kepatuhan perusahaan di mata otoritas pajak.

Dampak terhadap Arus Kas dan Kinerja Keuangan

Temuan penting dari analisis ini adalah dampak signifikan praktik perpajakan terhadap arus kas perusahaan. Posisi kelebihan bayar PPN yang konsisten, meskipun memberikan hak restitusi, menciptakan tekanan likuiditas karena dana perusahaan tertahan dalam sistem perpajakan. Kondisi ini diperburuk oleh proses restitusi yang relatif lambat, memaksa perusahaan untuk mengembangkan strategi pengelolaan arus kas yang lebih proaktif.

Untuk PPh Pasal 22, perusahaan menghadapi tantangan serupa dimana proses restitusi yang sulit menyebabkan pajak ini seringkali diperlakukan sebagai beban operasional. Hal ini menunjukkan perlunya strategi yang lebih sistematis dalam mengelola posisi perpajakan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap arus kas.

Implikasi Strategis dan Rekomendasi Pengembangan

Berdasarkan analisis komprehensif di atas, PT ABC telah membangun fondasi manajemen pajak yang solid namun masih memiliki ruang untuk optimisasi lebih lanjut. Rekomendasi strategis yang dapat diimplementasikan meliputi: Pertama, peningkatan integrasi sistem teknologi informasi perpajakan melalui koneksi langsung antara SAP dengan platform Direktorat Jenderal Pajak untuk mempercepat proses pelaporan dan mengurangi risiko kesalahan manual. Kedua, eksplorasi lebih mendalam terhadap insentif perpajakan yang tersedia, khususnya fasilitas tax holiday dan tax allowance yang dapat memberikan manfaat signifikan bagi perusahaan PMA. Ketiga, formalisasi kerja sama dengan konsultan pajak eksternal untuk menangani isu-isu kompleks dan memberikan second opinion dalam pengambilan keputusan perpajakan strategis. Keempat, pengembangan kebijakan perpajakan internal yang tertulis sebagai panduan formal bagi seluruh fungsi organisasi yang berinteraksi dengan aspek perpajakan. Kelima, implementasi sistem monitoring dan prediksi arus kas yang lebih canggih untuk mengantisipasi dampak posisi perpajakan terhadap likuiditas perusahaan.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa PT ABC telah mencapai tingkat kematangan yang memadai dalam implementasi best practice tax management, namun masih memerlukan penyempurnaan dalam aspek-aspek strategis dan operasional untuk mencapai optimisasi penuh dalam manajemen perpajakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi, dapat disimpulkan bahwa PT ABC telah mengimplementasikan kerangka kerja manajemen pajak yang memadai dan terstruktur, dengan fondasi yang kuat pada pemanfaatan sistem ERP (SAP), adanya tim khusus, dan kepatuhan terhadap prosedur audit internal maupun eksternal. Perusahaan menunjukkan komitmen yang tinggi dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara akurat dan tepat waktu, terbukti dengan tidak adanya sengketa pajak material dalam tiga tahun terakhir. Meskipun demikian, masih terdapat ruang untuk optimisasi. Tantangan utama yang dihadapi adalah tingginya biaya

kepatuhan (*tax compliance cost*) akibat kompleksitas regulasi, tekanan pada arus kas yang disebabkan oleh mekanisme restitusi PPN dan PPh Pasal 22, serta sistem teknologi yang belum terintegrasi secara penuh dengan platform digital otoritas pajak. Oleh karena itu, untuk mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas yang optimal, PT ABC perlu melakukan penyempurnaan strategis yang berfokus pada integrasi teknologi, pemanfaatan insentif fiskal secara proaktif, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta formalisasi kebijakan perpajakan internal yang terdokumentasi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, H. A., & Syahlina, S. (2020). Analisis: Pengaruh penanaman modal luar negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) di Provinsi Jambi. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 10(1). <https://doi.org/10.35448/jequ.v10i1.8578>
- Databoks. (2023). *Realisasi penerimaan pajak 2023*. <https://databoks.katadata.co.id>
- Handoko, B., & Prihadiati, R. R. L. A. (2023). Kepastian hukum Badan Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa konstruksi Indonesia dalam perjanjian penanaman modal asing di sektor konstruksi. *Humaniorum*, 1(2). <https://doi.org/10.37010/hmr.v1i02.16>
- Hasanuddin, H., & Roy, J. (2022). Pengaruh jumlah penduduk dan penanaman modal asing serta penanaman modal dalam negeri terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. *Forum Ekonomi*, 24(1). <https://doi.org/10.30872/jfor.v24i1.10394>
- IMF (International Monetary Fund). (2021). *Indonesia: 2021 Article IV consultation—Press release; staff report; and statement by the executive director for Indonesia*. <https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2021/03/25/Indonesia-2021-Article-IV-Consultation-503061>
- Juliana, D., Arba, A., & Djumardin, D. (2023). Pembubaran Perseroan Terbatas (PT) penanaman modal asing menurut hukum positif di Indonesia. *Indonesia Berdaya*, 4(3). <https://doi.org/10.47679/ib.2023546>
- Kementerian Investasi. (2023). *Laporan realisasi investasi triwulan I 2023*. <https://www.investindonesia.go.id>
- Pohan, C. A. (2015). *Manajemen pajak: Strategi perencanaan pajak dan bisnis*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan: Konsep dan aspek formal*. Rekayasa Sains.
- Ratnasari, E. D. A., & Aji, T. S. (2023). Pengaruh net ekspor dan penanaman modal asing terhadap cadangan devisa Indonesia. *Independent: Journal of Economics*, 2(2). <https://doi.org/10.26740/independent.v2i2.50862>
- Rumalutur, T., Kasmando, H. R., Marlissa, E. R., & Siahainenia, J. E. H. (2022). Pengaruh penanaman modal asing (PMA), penanaman modal dalam negeri dan belanja langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 6(3). <https://doi.org/10.56076/jkesp.v6i3.2165>
- Sari, I. (2020). Syarat-syarat penanaman modal asing (PMA) di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2). <https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.462>
- Suandy, E. (2016). *Perencanaan pajak* (Edisi ke-6). Salemba Empat.
- World Bank Group. (2020). *Indonesia economic prospects report*. <https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/indonesia-economic-prospects>

Evaluasi Manajemen Pajak pada Perusahaan Perdagangan Besar Barang Logam untuk Bahan Konstruksi (Studi Kasus di Perusahaan PMA PT. ABC)

Zhafari, F. R. (2023). Tinjauan yuridis terhadap keabsahan perjanjian nominee dalam penanaman modal asing (PMA) di PT Tadjahan Antang Mineral. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(3).